

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Arsip adalah sejarah terdokumentasi dari sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah. Arsip penting karena dapat digunakan sebagai bukti tanggung jawab dan sebagai sumber untuk membuat pilihan. Karena sifat arsip yang vital, pengelolaan arsip yang efisien harus dilaksanakan dari awal hingga akhirnya dimusnahkan. Dengan membangun manajemen yang andal, prosedur kantor yang semrawut dapat dikendalikan kembali. Jumlah arsip bertambah ketika organisasi membuat lebih banyak arsip. Sebagai konsekuensi dari tugas administrasi rutin, ukuran arsip akan bertambah.

Akibatnya, dokumen dalam arsip perlu disusutkan untuk memudahkan operasi manajemen arsip dan mencegah masalah dengan hal-hal seperti penggunaan peralatan, ruang penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, personel manajemen, dan pengambilan. Integritas informasi yang disimpan dalam arsip bergantung pada pelaksanaan proses penyusutan yang tepat. Karena arsip digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dinas atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka kegiatan reduksi arsip yang baik harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga bukti pertanggungjawaban.

Pelaksanaan penyusutan arsip dalam tingkat nasional telah dilakukan pertimbangan efisiensi dan efektivitas kerja yang sesuai dengan tindakan-tindakan dalam penyusutan arsip sehingga penyusutan arsip

tingkat nasional dalam setiap tahun nya semakin membaik. Maka dari itu, dasar penyusutan arsip telah diterbitkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Undang-undang ini diterbitkan untuk membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta memajukan kualitas pelayanan publik khususnya tentang kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Penyusutan arsip meliputi tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah arsip, seperti menghapus arsip yang tidak aktif dari unit kearsipan, menghapus arsip yang tidak relevan, dan memindahkan arsip statis ke organisasi kearsipan. Prosedur pengurangan ukuran arsip ini merupakan langkah ketiga dalam siklus pekerjaan arsip yang lebih besar. Dengan demikian, tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengurangi volume arsip secara keseluruhan.

Penyusutan arsip dilakukan dengan tiga cara di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat yaitu pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip. Ketiga metode tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusutan arsip dan melaksanakan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Yang mana ketiga cara tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pemindahan arsip biasanya digunakan oleh arsip vital dikarenakan usia arsipnya lama kemudia terbentur pada sarana penyimpanan atau pemeliharaan, kemudian dipindahkan kepada lembaga

kearsipan. Pada lembaga kearsipan spesifikasi kearsipan sudah standar kualitas tetapi belum tentu disuatu lembaga arsip tersebut terdapat sarana dan prasarana, sumber daya manusianya. Dalam lembaga kearsipan secara ketentuan pemilik arsip tersebut masih mempunyai kompeten dalam arsip tersebut. Kemudian proses pemusnahan dengan cara pembentukan tim sera kesepakatan tim dengan membuat data, daftar berita acara dilakukan jadwal retensi arsip (JRA) dan menentukan nilai guna dari arsip tersebut, apabila terdapat arsip yang masuk kearsip sejarah/statis atau arsip vital/ arsip yang memiliki data retensi 10 tahun. Arsip yang memiliki retensi 10 tahun buka berarti tidak musnah atau permanen, akan tetapi dilakukan nilai guna. Apabila nilai guna tersebut terpenuhi berarti arsip tersebut harus dilestarikan. Ketentuan pemusnahan arsip terdapat daftar berita acara dilakukan oleh kesepakatan tim yang akan dilaksanakannya pemusnahan arsip. Kemudian proses penyerahan arsip untuk arsip statis yang memiliki nilai guna untuk sejarah yang harus dirawat, dipelihara dan dilestarikan demi terkemahnya sejarah.

Penyusutan arsip dalam tingkat provinsi, khususnya provinsi Jawa Barat perlu dipertimbangkan, karena program penyusutan arsip tidak berjalan dengan baik setiap tahunnya. Berikut ini data bahwa penyusutan arsip di Provinsi Jawa Barat dalam setiap tahunnya:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Indikator kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Presentase OPD yang belum memenuhi standar baku	33 %	25%	21,28 %	14%	20%	15%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Didalam permasalahan yang peneliti ambil, terdapat OPD yang masih belum optimal dalam suatu kegiatan penyusutan arsip ini. Dalam perangkat daerah sendiri terdapat pencipta arsip dari tugas pokok organisasi perangkat daerah tersebut. Dari adanya pencipta arsip tersebut maka akan bertambahnya volume arsip setiap hari, bulan dan tahun maka dari hal tersebut perlu adanya pengelolaan arsip yang baik sesuai pedoman yang berlaku. Dari unit pengolahan perangkat daerah disimpan berkas arsip aktif semakin berjalannya waktu unit pengolahan tersebut harus melaksanakan penyusutan arsip secara berkala setiap tahun sekali. Masih banyak OPD yang belum melaksanakan kegiatan penyusutan arsip ini. Jadi dapat disimpulkan dalam penyusutan arsip disetiap Organisasi Perangkat Daerah kurangnya kesadaran pimpinan, keterbatasan kompetensi, kurangnya penyediaan dan pengembangan sarana, kurangnya pendanaan atau anggaran, terutama penerapan sanksi yang berlaku.

Dari pemaparan terkait permasalahan penyusutan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal, maka dari itu penulis tertarik penelitian ini yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ARSIP PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH (DISPUSIPDA) PROVINSI JAWA BARAT**”

#### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan masalah diatas, fokus masalahnya berkaitan dengan Implementasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi maka, rumusan masalah dari peneliti ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Penyusutan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ?
2. Apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Penyusutan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana upaya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meminimalisir hambatan dalam Penyusutan arsip?

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mengenai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan aturan dan pedoman penyusutan arsip
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Penyusutan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meminimalisir hambatan mengenai Penyusutan arsip

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Implementasi dalam penyusutan kearsipan guna kepentingan umum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis, yakni :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

###### **a. Bagi Penulis**

Kegunaan penelitian yang meneliti mengenai Implementasi dalam penyusutan kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ialah akan dijadikan sebagai media untuk peneliti agar menggunakan atau mempraktikkan segala teori yang pernah didapatkan selama kegiatan perkuliahan berlangsung, selain itu untuk menambah pengetahuan serta wawasan kepada peneliti.

### **b. Bagi Lembaga**

Bagi lembaga atau instansi penelitian ini agar bisa berguna untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai implementasi dalam penyusutan Kearsipan, serta sebagai masukan atau sumbangan pemikira bagi kaum akademisi.

### **c. Bagi Instansi**

Bagi instansi yang menjadi lokus penelitian ini, hasil penelitian diharapkan agar dijadikan sebagai alat evaluasi dalam peningkatan dalam penyelenggaraan penyusutan arsip, karena arsipnya masih belum optimal.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Kegunaan penelitian yang meneliti mengenai Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ARSIP) Nomor 37 tahun 2016 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ini sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat peneliti untuk memenuhi gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap).

### **b. Bagi Lembaga**

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut diharapkan dijadikan rekomendasi pada akademisi lainnya yang hendak melaksanakan penelitian serupa, selain itu diharapkan juga dapat berguna untuk menguraikan kajian Ilmu Administrasi Publik.

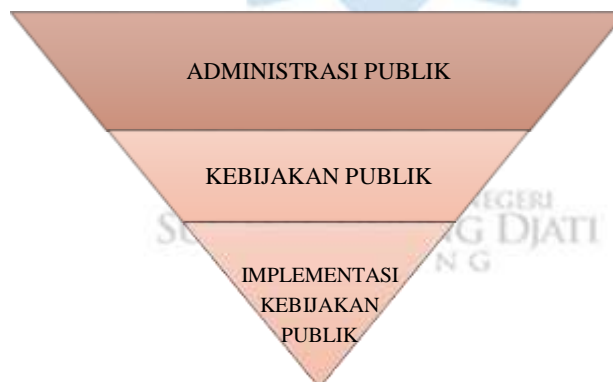
### c. Bagi Instansi

Pada penelitian ini dapat membagikan kegunaan bagi instansi yang menjadi lokus penelitian untuk meningkatkan upaya dalam penyelenggaraan penyusunan arsip khususnya di Provinsi Jawa Barat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

## F. Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran yang dipakai ini merupakan rancangan segitiga terbalik. Rancangan ini diawali dari *Grand Theory* yakni Administrasi Publik, *Middle Theory* yakni Kebijakan Publik dan *Operational Theory* yakni Implementasi Kebijakan Publik. Seperti dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Dari gambar diatas dapat dijelaskan :

*Grand Theory* yang digunakan oleh peneliti yaitu menurut Pasolong (2017:9) mengemukakan adminitrasi publik merupakan suatu kerjasama antar kelompok atau lembaga dengan merealisasikan tugas-tugas pemerintah untuk mencukupi kebutuhan publik secara efektif dan efisien



*Middle Theory* yang digunakan oleh peneliti yaitu menurut Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) serta dalam Herabudin (2016:21) mengutip bahwa kebijakan publik sebagai suatu yang dipilih negara sebagai sikap akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu beserta beberapa karakter tertentu.

*Operational Theory* yang peneliti gunakan yaitu Implementasi Kebijakan Publik menurut *George C. Edward III* yang dikutip dalam Akrib (2010:2) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.

Menurut *George C. Edward III* dalam (Agustino,2017:136) menyatakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impac on Implementasi*. Kemudian model implementasi kebijakan menurut Edward yaitu akan memutuskan pencapaian implementasi dalam suatu kebijakan yang terdiri dari empat variabel, yaitu:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi menurut *Edward III* yaitu sangat menentukan suatu keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Suatu implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa saja yang akan mereka kerjakan. Komunikasi pun sangat dibthkan agar para embuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat.

## 2. Sumber daya

Sumber daya dalam *Edward III* yang paling utama dalam implementasi kebijakan. Sering terdapat kegagalan dalam implementasi yaitu sumber dayanya karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak berkompeten. Impelemtor harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat diberi tugas untuk melakukan suatu tindakan. Dan penambahan jumlah staf belum tentu mencukupi, tetapi diperlukan juga staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

## 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor paling penting ketiga dalam pendekatan kebijakan pelaksana suatu kebijakan publik. Apabila suatu pelaksana suatu kebijakan dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi harus memiliki kemampuan dalam melaksanakannya.

## 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang sangat kompleks dengan menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal-hal tersebut menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga dapat menghambat jalannya kebijakan.



**Gambar 2**

**Kerangka Konseptual**

**G. Proposisi**

Implementasi Peraturan tentang Penyusutan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya akan baik jika memenuhi empat kriteria implementasi kebijakan oleh *George C. Edward III*, yaitu 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi.